

Inspektorat Kota Samarinda
Jl. Dahlia No.9 RT.04 Telp/Fax (0541) 741003
email : inspektoratkotasmd@gmail.com



### 'PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

#### **INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Dahlia No. 09 RT. 04 Kel. Bugis **(0541)** 741003 Fax. 741270 SAMARINDA

Penyelenggaraan Pengawasan Profesional Menuju Pemerintahan Yang Baik

## LAPORAN HASIL REVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

Kepada : Wali Kota Samarnda

Dari : Plt. Inspektur Kota Samarinda

Tanggal: 25 Maret 2025

Nomor : 700.1.2.1/324/200

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) Dokumen

Hal : Laporan Hasil Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

tahun 2024

Berdasarkan Surat Tugas Plt. Inspektur Kota Samarinda Nomor 800.1.11.1/119/200 tanggal 31 Januari 2025 dan Nomor 800.1.11.1/251/200 tanggal 4 Maret 2025 dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

#### I. Pendahuluan

#### A. Dasar Penugasan

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.7/10582/OTDA tanggal 24 Desember 2024 tentang Penyampaian Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2024:

- 6. Surat Tugas Inspektur Daerah Kota Samarinda Nomor 800.1.11.1/119/200 tanggal 31 Januari 2025 untuk melakukan reviu LPPD Kota Samarinda tahun 2024:
- Surat Tugas Inspektur Daerah Kota Samarinda Nomor 800.1.11.1/251/200 tanggal 4 Maret 2025 untuk melakukan Perpanjangan reviu LPPD Kota Samarinda tahun 2024.

#### B. Ruang Lingkup Reviu

- 1) Capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, meliputi:
  - a. Capaian kinerja makro terdiri atas:
    - Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
    - Angka Kemiskinan
    - Angka Pengangguran
    - Pertumbuhan Ekonomi
    - Pendapatan Perkapita
    - Ketimpangan Pendapatan (GINI Ratio)
  - b. Capaian Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan

Diukur dari indikator Kinerja masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang digunakan untuk mengukur secara obyektif dan dapat diperbandingkan antar Daerah

c. Capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah.

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Progran dan Kegiatan yang dihasilkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

2) Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan meliputi:

- a. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh Daerah Provinsi dari Pemerintah Pusat
- b. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah Kabupaten/Kota dari Pemerintah Pusat dan/atau Provinsi dari Pemerintah Daerah Provinsi.
- 3) Capaian kinerja penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
  Capaian kinerja penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) meliputi:
  - a. Capaian penerapan standar pelayanan minimal

- b. Kendala penerapan standar pelayanan minimal
- c. Ketersediaan anggaran dalam penerapan standar pelayanan minimal

#### II. Hasil Reviu

Pengujian terhadap rancangan LPPD tahun 2024 dilakukan atas dokumen yang tersajikan baik yang disampaikan kepada Tim Reviu maupun dalam Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SILPPD) per 24 Maret 2025

A. Pencermatan Kesesuaian Materi dan Sistematika Rancangan LPPD

#### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Telah menguraikan mengenai:

1.1.1 Penjelasan Umum

Bagian ini memuat informasi tentang profil daerah secara umum yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Undang-Undang pembentukan daerah;
- b. Data Geografis Wilayah;
- c. Jumlah Penduduk;
- d. (Belum menginformasikan jumlah Kecamatan Dan Kelurahan)
- e. Jumlah perangkat daerah, unit kerja perangkat daerah dan pegawai pemerintah
- f. Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di setiap Perangkat Daerah
- g. Realisasi anggaran dan pendapatan belanja daerah.
- h. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang Memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja
- 1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

Bagian ini memuat informasi yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:

a. Permasalahan strategis pemerintah daerah;

- b. Visi Dan Misi Kepala Daerah;
- c. Program pembangunan daerah, berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah, dan
- d. Kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan (RKPD 2023).

#### 1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Bagian ini memuat hal-hal terkait dasar penerapan standar pelayanan minimal, dasar penerapan pelayanan minimal, kebijakan umum daerah dalam rencana penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan gambaran orientasi dan komitmen yang ditetapkan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun dalam rangka penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran yang telah dijelaskan dari laporan LPPD Tahun 2024 dan telah sesuai dengan Pedoman Penyusunan LPPD tahun 2024.

## BAB II. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Telah menguraikan mengenai:

#### 2.1 Capaian Kinerja Makro

Dalam Penjelasan Kinerja Makro telah dijelaskan dan sesuai dengan pedoman LPPD yang berisikan :

- a. Indeks Pembangunan Manusia
- b. Angka Kemiskinan
- c. Angka Pengangguran
- d. Pertumbuhan Ekonomi
- e. Pendapatan Per kapita
- f. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

#### 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Dalam Penjelasan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan telah dijelaskan dan sesuai dengan pedoman LPPD yang berisikan:

- a. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)
- b. Indikator Kierja Kunci Untuk fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

#### 2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Dalam Penjelasan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dijelaskan dan sesuai dengan pedoman LPPD Tahun 2024 yang berisikan :

- a. target kinerja dalam perjanjian kinerja;
- b. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja;
- c. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya;
- d. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah;
- e. analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai; dan
- f. analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.

BAB III. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dalam Pedoman LPPD 2024 telah menguraikan:

- 1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
- 2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan.
- 3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan
  - 3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kota
  - 3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kota
  - 3.3 Permasalahan dan Kendala
  - 3.4 Saran dan Tindak Lanjut

# BAB IV. PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Dalam Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Penyajian data telah telah menguraikan:

#### 4.1 Urusan Pendidikan

Laporan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal memuat:

- Jenis Pelayanan Dasar
- Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah
- Realisasi
- Alokasi Anggaran

- Dukungan Personil
- Permasalahan dan Solusi

#### 4.2 Urusan Kesehatan

Laporan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal memuat:

- Jenis Pelayanan Dasar
- Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah
- Realisasi
- Alokasi Anggaran
- Dukungan Personil
- Permasalahan dan Solusi

#### 4.3 Urusan Pekerjaan Umum

Laporan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal memuat:

- Jenis Pelayanan Dasar
- Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah
- Realisasi
- Alokasi Anggaran
- Dukungan Personil
- Permasalahan dan Solusi

#### 4.4 Urusan Perumahan Rakyat

Laporan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal memuat:

- Jenis Pelayanan Dasar
- Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah
- Realisasi
- Alokasi Anggaran
- Dukungan Personil
- Permasalahan dan Solusi

#### 4.5 Urusan Kententraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Laporan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal memuat:

- Jenis Pelayanan Dasar
- Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

- Realisasi
- Alokasi Anggaran
- Dukungan Personil
- Permasalahan dan Solusi

#### 4.6 Urusan Sosial

Laporan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal memuat:

- Jenis Pelayanan Dasar
- Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah
- Realisasi
- Alokasi Anggaran
- Dukungan Personil
- Permasalahan dan Solusi

#### 4.7 Program dan Kegiatan

Laporan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal memuat:

- Jenis Pelayanan Dasar
- Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah
- Realisasi
- Alokasi Anggaran
- Dukungan Personil
- Permasalahan dan Solusi

#### BAB V. PENUTUP

Untuk penutup telah tersajikan dalam rancangan LPPD tahun 2024

#### B. Pencermatan Data Dukung IKK

Pencermatan data dukung dilakukan dengan melakukan penelitian mengenai sumber data, akurasi penghitungan dan kebenaran yang meliputi IKK atas :

- 1. Capaian Kinerja IKK Makro
- Capaian Kinerja IKK Hasil Per bidang Urusan Pemerintahan
   IKK hasil penyelenggaran urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan pada tahun 2024
- 3. Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah tahun 2024

#### III. Simpulan dan Rekomendasi

#### A. Simpulan

1. Materi dan Sistimatika Rancangan LPPD

Berdasarkan hasil reviu kesesuaian materi dan sistematika LPPD Kota Samarinda tahun 2024 **belum** sepenuhnya sesuai dengan Pedoman Penyusunan LPPD tahun 2024 dan **belum** sepenuhnya menggambarkan secara rinci bagian-bagian yang menjadi pendukung dalam penyusunan LPPD Tahun 2024, hal tersebut dapat dilihat pada *Lampiran 1* 

#### 2. Capaian IKK hasil (outcome)

#### a. Indikator Makro

Dari hasil reviu diketahui terdapat 6 (enam) Capaian Kinerja Makro yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita dan Ketimpangan Pendapatan (GINI Ratio). Capaian Kinerja Makro memiliki 6 IKK Outcome. Setelah dilakukan reviu diketahui 6 IKK hasil (*Outcome*) atau 100% **telah** didukung dengan data yang memadai, hal tersebut dapat dilihat pada *Lampiran* 2

### b. Capaian Kinerja IKK Hasil Per bidang Urusan Pemerintahan

#### Urusan Wajib

Urusan wajib, Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar, terdiri dari 24 Urusan Pemerintahan, 87 IKK hasil (*outcome*). Setelah dilakukan reviu diketahui 54 IKK hasil (*outcome*) atau 62,07% **telah** didukung dengan data yang memadai, 12 IKK atau 13,79% **belum tepat/belum didukung** dokumen yang memadai dan 21 IKK atau 24,14% **belum ada** dokumen pendukung.

#### Urusan Pilihan

Pemerintah Kota Samarinda menyelenggarakan 5 (lima) urusan Pilihan yaitu Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Perdagangan, dan Perindustrian, memiliki 20 IKK hasil (*outcome*). Setelah dilakukan reviu diketahui 16 IKK hasil (*outcome*) atau 80% telah didukung dengan data yang memadai, 1 IKK atau 5% belum tepat/belum didukung dokumen yang memadai dan 3 IKK atau 15% belum ada dokumen pendukung.

· Fungsi Penunjang Pemerintahan

Dari hasil reviu diketahui terdapat 5 (lima) Fungsi Penunjang Pemerintahan yaitu Perencanaan dan Keuangan, Pengadaan, Kepegawaian, Manajemen Keuangan, dan Transparansi dan Partisipasi Publik. Penunjang Pemerintahan memiliki 19 IKK hasil (outcome). Setelah dilakukan reviu diketahui terdapat 13 IKK hasil (outcome) atau 68,42% telah didukung data yang memadai, 1 IKK atau 5,26% belum tepat/belum didukung dokumen yang memadai dan 5 IKK atau 26,32% belum ada dokumen pendukung.

Berdasarkan reviu kami, secara umum tidak terdapat kondisi atau halhal yang menimbulkan perbedaan dalam menyakini keandalan informasi yang disajikan didalam Capaian Kinerja ini. Namun dari 24 Indikator Sasaran Strategis Pemerintah Kota Samarinda masih terdapat 10 (sepuluh) Indikator Sasaran Strategis yang Dokument belum Andal, 6

c. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Lampiran 4)

(enam) Indikator Sasaran Strategis yang terget Kinerjanya lebih rendah daripada Capaian Kinerja tahun 2023 dan Terdapat 11 (sebelas) Indikator Sasaran Strategis yang Sasaran/indikator sasaran/satuan

indikator pada capaian kinerja yang belum selaras dengan Dokumen Perencanaan

#### B. Rekomendasi

Atas simpulan diatas direkomendasikan kepada Wali Kota Samarinda agar menginstruksikan kepada Kepala OPD dan Tim penyusun LPPD Kota Samarinda tahun 2024 untuk:

- Melakukan perbaikan atas Sistematika dan materi pada rancangan akhir LPPD tahun 2024 Pemerintah Kota samarinda sebelum tanggal 31 Maret 2025 sesuai hasil pengujian pada link. <a href="https://drive.google.com/file/d/1WtyVeVBmK9MQ7WvohilFWL0zWPQbE7">https://drive.google.com/file/d/1WtyVeVBmK9MQ7WvohilFWL0zWPQbE7</a>
   2s/view?usp=drive link
- Melengkapi seluruh data dukung sebelum tanggal 31 Maret 2025, terhadap capaian kinerja IKK hasil (outcome) yang belum memadai dan yang belum tersajikan sebagai berikut:
  - a. Urusan Wajib
    - 1) 12 IKK Hasil (Outcome) belum didukung dokumen yang memadai.

2) 21 IKK Hasil (Outcome) belum ada dokumen pendukung.

#### b. Urusan Pilihan

- 1) 1 IKK Hasil (Outcome) belum tepat/belum didukung dokumen yang memadai
- 2) 3 IKK Hasil (Outcome) belum ada dokumen pendukung.

#### c. Fungsi Penunjang

- 1) 1 IKK Hasil (Outcome) belum tepat/belum didukung dokumen yang memadai
- 2) 5 IKK Hasil (Outcome) belum ada dokumen pendukung.
- Melampirkan dan melengkapi data-data dukung sebelum tanggal 31 Maret 2025, terhadap 10 (sepuluh) Indikator Sasaran Strategis Capaian Akuntabilitas Kinirja yang dokumennya belum Andal.
- Kedepannya dalam menetapkan target kinerja pada Perjanjian Kinerja agar ditetapkan dengan perhitungan yang tepat dengan mempertimbangkah hasil capaian tahun sebelumnya
- Kedepannya dalam menyusun materi Perjanjian Kinerja agar memperhatikan keselarasan dengan IKU dan RPJMD

#### IV. Penutup

Demikian laporan hasil reviu ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan selanjutnya.

Plt. Inspektur,

Marnabas, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda (IV.c)

Nip. 19680628 198803 1 003

PENGUJ	IAN KESESUAIAN ATAS SISTEMA	ΓΙΚΑ D	ENGA	N MATERI LPPD
Laporan Peny	elenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Samarinda MATERI/URAIAN	Kesesua ian Sistemat ika	Kesesu	Catatan
BAB I Pendahulu				
1.1 Latar Belakang		Sesuai	Sesuai	Terdapat salah ketik tahun anggaran pada paragraf 1
1.1.1 Penjelasan	a. Undang-undang pembentukan daerah	Sesuai	Sesuai	
Umum	b. Data geografis wilayah	Sesuai	Sesuai	
	c. Informasi umum data kepenndudukan	Sesuai	Sesuai	
		Tidak Sesuai		Belum menginformasikan jumlah kecamatan dan kelurahan
	Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja e. Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah			langsung masuk poin e, poin d tidak ada
	Rincian ASN berdasarkan urusan pemerintahan, fungsi penunjang urusan pemerintahan, fungsi f. pengawasan dan fungsi pendukung urusan pemerintahan yang berada di setiap perangkat daerah	ungsi   Sesual   Se		Tabel belum terisi, penjelasan juga belum ada
	g. Realisasi anggaran dan pendapatan belanja daerah h. Pelaksanaan program yang memuat alokasi anggaran dan realisasi belanja	Sesuai	Sesuai	
1.1.1 Perencanaan Pembangunan Daerah	a. Permasalahan strategis	Sesuai	Sesuai	Masih terdapat beberapa masalah pokok yang menyajikan permasalahan dari beberapa tahun sebelumnya (dinilai tidak relevan)
	b. Visi dan misi kepala daerah	Sesuai	Sesuai	
	c. Program pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah,	Sesuai	Sesuai	
	d. Kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan	Sesuai	Sesuai	Penjelasan masih mengacu pada RKPD Tahun 2023
1.1.1 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Bagian ini memuat hal- hal terkait dasar penerapan standar pelayanan minimal, dasar penerapan pelayanan minimal, kebijakan umum daerah dalam rencana penerapan dan pencapaiar standar pelayanan minimal	Sesuai	Tidak Sesuai	Belum menggambarkan SPM telah tertuang pada RPJMD dan KUA

•	elenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Samarinda	Kesesua ian Sistemat ika	Kesesu aian	Catatan
SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN	<del> </del>		
	N KINERJA PENYELENGGARAAN			
PEMERINTAHA		<del> </del>		
2.1 Capaian Kinerja Makro	Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum, meliputi 1.Indeks Pembangunan Manusia 2. Angka Kemiskinan 3.Angka Pengangguran 4.Pertumbuhan Ekonomi 5.Pendapatan Per kapita 6.Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	Sesuai	Sesuai	
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah.  1.Indikator Kinerja Kunci Hasil  2.Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Sesuai	Sesuai	1. Masih terdapat penjelasan mengenai IKK output. 2. Terdapat salah ketik tahun pada penjelasan indikator kinerja kunci
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah. Informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah memuat:  a. target kinerja dalam perjanjian kinerja; b. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja; c. analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai; dan d. analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.	Sesuai		Penyajian capaian akuntablitas kinerja belum sesuai dengan capaian kinerja yang telah direviu secara terpisah dan telah ditindaklanjuti.

	elenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Samarinda	Kesesua ian Sistemat ika	Kesesu aian Materi	Catatan
SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN	70077 4 37		
	N KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBA		0 .	
Capaian Kinerja	3.1.Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas	Sesuai	Sesuai	
pelaksanaan tugas	Pembantu			İ
pembantu	3.2.Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas			
meliputi :	Pembantuan			
	3.3.Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas			
	Pembantuan	İ		
	3.3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh daerah Kab/Kota, berisi			
	target, realisasi dan matriks capaian kinerja.			
	3.3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang			
	dilaksanakan oleh daerah Kab/Kota, berisi target			
	kinerja, realisasi dan matriks capaian kinerja			1
	3.3.3 Permasalahan dan kendala			
	3.3.4 Saran dan Tindak Lanjut			
	3			
DAD IV DENEDA	APAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYA	NI A BI BAIYA	TERM A V	
4.1 Urusan	Laporan Penerapan dan pencapaian standar	Sesuai		Masih tercantum narasi
Pendidikan	pelayanan minimal memuat:	Sesual	Sesual	penulisan tahun 2023
7 011010111111	4.1.1.Jenis Pelayanan Dasar			
	4.1.2. Target Pencapaian SPM	ł		
	4.1.3.Realisasi			
	4.1.4.Alokasi Anggaran			
	4.1.5.Dukungan Personil	]		
	4.1.6.Permasalahan dan Solusi			
4.2 Urusan	Laporan Penerapan dan pencapaian standar	Sesuai	Sesuai	Masih tercantum narasi
Kesehatan	pelayanan minimal memuat :			penulisan tahun 2023
	1.Jenis Pelayanan Dasar	ŀ		İ
	2. Target Pencapaian Standar Pelayanan			
	Minimal oleh Daerah			
	3.Realisasi			
	4.Alokasi Anggaran			
	5.Dukungan Personil 6.Permasalahan dan Solusi			
4.3 Urusan	Laporan Penerapan dan pencapaian standar	Sesuai	Sesuai	Masih tercantum narasi
Pekerjaan Umum	pelayanan minimal memuat :	Joseph	Dosual	penulisan tahun 2023
J	1.Jenis Pelayanan Dasar			17
	2. Target Pencapaian Standar Pelayanan			
	Minimal oleh Daerah			
	3.Realisasi	]		
l l	4.Alokasi Anggaran			
	4.Alokasi Anggaran			
	4.Alokasi Anggaran 5.Dukungan Personil 6.Permasalahan dan Solusi			

	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Samarinda  ISTEMATIKA MATERI/URAIAN			Catatan
		C	C	Masih tercantum narasi
4.4 Urusan	Laporan Penerapan dan pencapaian standar	Sesuai	Sesuai	16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1
Perumahan	pelayanan minimal memuat :			penulisan tahun 2023
Rakyat	1. Jenis Pelayanan Dasar			
	2. Target Pencapaian Standar Pelayanan			
	Minimal oleh Daerah			
	3.Realisasi			
	4.Alokasi Anggaran			
	5.Dukungan Personil			
4.5 Urusan	6.Permasalahan dan Solusi	Sesuai	Sesuai	Masih tercantum narasi
	Laporan Penerapan dan pencapaian standar	Sesuai	Sesuai	
Ketenteraman, Ketertiban Umum	pelayanan minimal memuat :			penulisan tahun 2023
	1. Jenis Pelayanan Dasar			
dan Perlindungan	Z.Target Pencapaian Standar Pelayanan     Minimal oleh Daerah			
Masyarakat	3.Realisasi			
	4.Alokasi Anggaran			
	5.Dukungan Personil	1		
	6.Permasalahan dan Solusi			
4.6 Urusan Sosial	Laporan Penerapan dan pencapaian standar	Sesuai	Sesuai	Masih tercantum narasi
1.0 Crusuri Sosiur	pelayanan minimal memuat :	Desaur	Bestair	penulisan tahun 2023
	1. Jenis Pelayanan Dasar			penansan tanan 2025
	2. Target Pencapaian Standar Pelayanan			
	Minimal oleh Daerah			
	3.Realisasi			
	4.Alokasi Anggaran			
	5.Dukungan Personil			
	6.Permasalahan dan Solusi			
4.7 Program dan				
Kegiatan				
BAB V PENUTUI	2			

Hal -hal yang perlu diperhatikan:

- 1. Masih tercantum narasi penulisan tahun 2023
- 2. Penomoran tabel masih belum urut.
- 3. Penomoran gambar masih belum urut.
- 4. Penomoran subbab masih belum sesuai pada Bab I
- 5. Belum semua hasil tabel menyajikan sumber data

Data dapat dilihat pada link

https://drive.google.com/file/d/1WtyVeVBmK9MQ7WvohilFWL0zWPQbE72s/view?usp=drive\_link

### IKK MAKRO

NO	o ikk	RUMUS	CARATAN MINERIA 2022	CAPAIAN KINERJA 2024	LAJU KINERJA 2024	CATTIANI	PEMDA	APIP	
NO	IKK		CAPAIAN KINERJA 2023			SATUAN	BUKTI FISIK	STATUS	KETERANGAN
1	Indeks Pembangunan Manusia	Laju Indeks Pembangunan Manusia	82.61	83.11	0.605	%	Ada	OK	
2	Angka Kemiskinan	Laju Angka Kemiskinan	4.81	4.3	-10.603	%	Ada	ОК	
3	Angka Pengangguran	Laju Angka Pengangguran	5.92	5.75	-2.872	%	Ada	ОК	
4	Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	8.62	8.66	0.464	%	Ada	ОК	
5	Pendapatan Per-Kapita	Laju Pendapatan Per-Kapita	103598711.2	113,316,043.00	9.38	%	Ada	ОК	
6	Ketimpangan Pendapatan	Laju Kelimpangan Pendapatan	0.323	0.33	2.167	%	Ada	ОК	

#### IKK OUTCOME

			<b>.</b>		Table Street, I	THE PARTY OF THE P		7.77 (1.78 (
No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat etau	Capstan 116.3565	File Bukti Ada	Status OK	Keterangan
	Urusan Pemerintahan Wajib	Pendidikan	Tingket partisiposi warga negara usia 5-6	Jumlah anak usia 5-6 tamin yang sudan tamat atau Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat	98.49581	Ada	OK OK	
1.a.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Tingkat pertisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Julian anak isia 7-12 tahun yang sebuah tahus atau sedang belajar di sekolah dasar = 94227. Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 95666	30.43301	7100	<b></b>	
1.a.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkuitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajur di sekolah menengah pertama = 47746. Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 49893	95.69679	Ada	OK	
1.a.4	Urusan Pemerintahun Wajib Berkuitan Pelayanan Dasar	Pendidikun	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sodang belajar di pendidikan kesetaraan = 3282. Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kab/kota yang bersangkutan = 8343	39.33837	Ada	ОК	
1.b.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Keschatan	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan = 2010. Jumlah Penduduk di kabupaten/kota = 881225	2.280916	Ada	OK	
1.b.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Keschatan	Persentaso RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakroditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi = 15. Jumlah RS di kabupaten/kota = 15	100	Ada	TIDAK OK	Lampirkan SK walikota terkait penetapan RS Rujukan (sesuai podoman)
1.b.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan = 12204. Jumlah sasaran ibu bersalin di kabupaten/kota = 14121	86.42447	Ada	OK	
1.b.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendepatkan pelayanan persalinan = 12656. Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota = 13480	93.88724	Ada	OK	
1.b.5	Unsan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Keschatan	Persentaso bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 11781. Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota = 12838	91.76663	Ada	OK	
1.b.6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Keschatan	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 49854. Jumlah balita di kabupaten/kota = 56248	88.63248	Ada	OK.	
1.b.7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Keschatan	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayaruan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapukan layanan kesehatan sesuai stender = 110137. Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota = 145559	75.66485	Tidak Ada		
1.b.8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Keschatan	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai stendar = 438037. Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota = 588826	74.39159	Tidak Ada		
1.b.9	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Keschaten	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendepatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten/kota	0	Tidak Ada		
1.b.10	Urusan Pemerintahan Wajib Berknitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase penderita hipertensi yang mendapetkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 214129. Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota = 216281	99.005	Ada	OK	
1.b.11	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentaso penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 24118. Jumlah penderita DM di kabupaten/kota = 24618	97.96897	Ada	OK	
1.b.12	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase ODGI berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar 	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan keselatan sesuai standar = 1090. Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota = 1357	80.32424	Ada	OK	
1.b.13	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Keschatan	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Numlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan setuai standar = 1851 2. Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota = 23227	79.70035	Ada	OK	
1.b.14	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terimfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan detelesi dini HIV sesuai standar = 28201. Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota = 28235	99.87958	Ada	OK	
1.c.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataar Ruang	Rasio luas kuwasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian benjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota	Luss kawasan pennukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infiastruktur pengendelian banjir di WS Kowenangan Kab/Kota (ha) = 251.2. Luss kawasan permukiman rawan banjir di WS Kowenangan Kab/Kota (ha) = 511.2	49.13928	Ada	OK	
	l	i .	L.,	L	l .		L	<u> </u>

Urusan Pemerintahan Wajib	Pekerjaan Umum dan Penataan	Dario luga laurana namada	1 1		Ada	OK	
Berknitan Pelayanan Dasar		pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	Luss kawasan permukiman sepanjang pantai nawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m) = 0. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m) = 1	9	rua	UK .	
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas daerah irigasi kowenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kowenangan kabupaten/kota yang dilayeni oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), diringkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun deisiting = 1510.34. luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota = 1820.48	82.96383	Ada	OK	
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Pensitaan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan aloces terhadap air minum melalui SPAM jaringan peripasan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Jumlah kumuletif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air mimum melatui SPAM jaringan peripipan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota. Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut.	0	Tidak Ada		
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penstaan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik , ,	Jamlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbelunya diolah di IPALD. Jumlah rumah di Kabupaten A	0	Tidak Ada		
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai peruntukarnya. Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku	0	Tidak Ada	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Iumlah penjang jalan dalam kondisi mantap = 776.799. Jumlah total panjang jalan kabupaten/kota = 881.302	88.1422	Ada	OK	
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi 	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabu/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analis = 407. Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analis di wilayah Kabupaten/Kota = 5167	7.876911	Ade	TIDAK OK	bukti dukung belum ber tanggal bukti dukung pembilang belum berjumlah 2616 dan belum melampirkan sertifikat koreksi jumlah penyebut 5.166
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio proyek yang menjadi kowenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi = 1169. Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya = 1173	99.65899	Ada	TIDAK OK	bukti dukung belum bertanggal
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Penyodisan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban beneana kabupaten/kota 	Jumlah unit rumah korban beneuna yang ditangani pada tahun n = 129. Jumlah total reneana unit rumah korban beneuna yang akan ditangani pada tahun n = 129	100	Tidak Ada		
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyurakat terdampek relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Benguasan + Rumah Tangap Penerima Subsidi Uang Sowa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni. Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Doerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	0	Tidak Ada		
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	ånbsp; Persentase kawasan permukiman kurnuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha). Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	0	Tidak Ada		
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Humi)	Jumlah unit rumah tidak layak huni. Jumlah total unit rumah kabupaten/kota	ō	Tidak Ada		
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	,Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Praserana, Serana den Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU. Jumlah unit rumah kab/kota	0	Tidak Ada		

	Urusan Pemerintahan Wajib Berkuitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani = 169. Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk = 169	100	Ada	ок	
	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentruman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan = 13. Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi = 13	100	Ada	ОК	
	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dosar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan	0	Tidak Ada		
1.c.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Porlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaun terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana . Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	0	Tidak Ada		
1.c.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negaru yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana	0	Tidak Ada		
1.e.6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayaran Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi kerban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakusis korban dan terdampak kebakuran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Diras Pemadam Kebakuran dan Pertyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pernadaman di kabupaten/kota dalam tingk. Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota	0	Tidak Ada		
1.c.7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkuitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarukat	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Reta-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	0	Tidak Ada		
1.£1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Social	åmbsp.Persentase (%) penyandang disabilitas terlamtar, anak terlamtar, lanjut usia terlamtar dan golandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasamya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasamya di luar panti = 600. Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis = 708	84.74576	Ada	TIDAK OK	data pendukung penyebut melampirkan data by name by address
1.£2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkuitan Pelayanan Dasar	Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darumt bencana daerah kabupaten/kota , ,	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terperuhi keburuhan dasamya dalam satu tahun anggaran = 256. Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jamiran sosial pada sast dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota = 256	100	Ada	OK	
2.a.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkuitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	&nbsp.Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegistan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD = 9. Jumlah kegistan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota = 15	60	Ada	TIDAK OK	Belum melampirkan Leporan pelaksanaan kegiatan
2.a.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	&mbspPersentaso&mbsp Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi = 18957. Jumlah tenaga kerja keseluruhan = 78275	24.21846	Ada	TIDAK OK	Belum melampirkan rincian tenaga kerja (fampiran untuk data penyebut)
2.a.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkuitan Pelayanan Dasar	Тепада Кегја	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) = 58247.25. Jumlah tenaga kerja = 78275	74.41361	Ada	OK	
2.a.4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentaso Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Jumlah Perusahaan yang menerupkan tata kelola kerja yang layak = 1142. Jumlah Perusahaan = 2224	51.34892	Ada	OK	
2.a.5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupeten/kota	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan = 327. Jumlah pencaker yang terdaftar = 2030	16.10837	Ada	OK	

2g1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak		Persentase ARG pada belanja langsung	Jumlah ARG pada belanja operasi dan modal	9.093823	Ada	TIDAK OK	Laporan yang dilampirkan
	Berkaitan Pelayanan Dasar	Perlindungan Anak		APBD = 498081596815. Jumlah seluruh belanja operasi dan modal APBD = 5477141877364				adalah pengawasan PPRG untuk tahun 2023 dan belum dilakukan pengawasan PPRG untuk tahun 2024
2.g.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak	Pemberdayaan Perempuan dan	Persentase anak korban kekerasan yang	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18	88.81579	Ada	OK	
		Perlindungan Anak	ditangani instansi terkait kabupaten/kota	tahun) korben kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi = 135. Jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) = 152				
L	It. D Walk Tiddle	Pemberdayaan Perempuan dan	Rasio kekerasan terhadap perempuan,	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan =	29.57199	Ada	OK	
	Urusan Pemerintahan Wejib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perindungan Anak	Ranto kakerasan terinadap perampuan, terinasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	90. Juniah penduduk perempuan = 304342	25.57135	,,,,,,	<b></b>	
$\square$			P	I.—I.b. anderson associated	44.16923	Ada	OK	
2.h.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berksitan Pelayanan Dasar	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan berazi jagung sesuai kebutuhan)	Jumlan cedangan pengan pemernuan kabupaten/kota = 28.71. Jumlah tanget cadangan pengan pemerintah kabupaten/kota yang ditetapkan = 65	44.16923	Aoa	UK.	
	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Persentase pemanfantan tanah yang sesuai dengan penuntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan Kesesunian Kegiatan Pemanfastan Ruang (KKPR). seluruh luas tanah yang diberikan Kesesunian Kegiatan Pemanfastan Ruang (KKPR)	O	Tidak Ada		
2.i.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak	Pertanahan	Persentase penetapan tanah untuk	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan	0	Tidak Ada		
	Berkaitan Pelayanan Dasar		pembangunan fasilitas umum	fasilitas umum. Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum				
2.i.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak	Pertanahan	Tersedianya lokasi pembangunan dalam	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan	100	Ada	OK	
:	Berkniten Pelayanan Dasar		rengka penanaman modal. , ,&nbap	peruntukannya di atas Kosesusian Kegiatan Pemanfastan Ruang (KKPR) = 894175.24. Luas tanah di atas Kesesusian Kegiatan Pemanfastan Ruang (KKPR) yang diterbitkan = 894175.24				
2.i.4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Tersedianya Tenah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee  ,	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih beser sama dengan 0.5 ha; = 0. Jumlah penerima tanah obyek landreform = 1	0	Ada	ОК	Tambahkan Tabel nihil
2.i.5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak	Pertanahan	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan	100.3117	Ada	TIDAK OK	1. Sesusikan KOP Bukti
	Berkaitan Pelayanan Dasar			Izin Membuka Tanah = 14310256. Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan = 14265790				dukung dengan yang ada di podoman 2. Tenggal harus dissi 3. Lengkapi isi tabel yang disajikan dalam bukti dukung
2.i.6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak	Pertanahan	Penangan sengketa tanah garapan yang	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani.	ō	Tidak Ada		
	Berkaitan Pelayanan Dasar		dilakukan melalui mediasi  ,	Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan				
2.j.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota		63.28	Ada	ок	
2.j.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak	Lingkungan Hidup	Terlaksananya pengelolaan sampah di	Jumlah Total Vol sampah yang dapat ditangani =	99.26737	Ada	OK	<del> </del>
	Berkaitan Pelayanan Dasar		wilayah Keb/Kota	224115.8. Jumlah seluruh Total vol timbunan sampah tahun berjalan kabupaten/kota = 225769.85				
2.j.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan  kehadap izin lingkungan, zian PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah peranggung jawab usaha dar/atau kegiatan yang melanggar terhadap izan lingkungan, dan izin PELH yang diterbitkan Pemerintah Kab/Kota = 10. usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan = 41	24.39024	Ada	OK	
2.k.1.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP elektronik	Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP = 624239. Jumlah penduduk 17 tahun ke atas = 626604	99.62257	Ada	OK	
				Lahun ke atas = 626604				

2.k1.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkuitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukun dan Pencatatan Sipil		Jumlah anak usia 0-17 tahun kurung 1 (setu) hari yang sudah memiliki KIA = 186060. Jumlah anak usia 0-17 tahun = 254618	73.07417	Ada	ОK	
2.k1.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir = 265753. Jumlah anak usia 0-18 tahun = 280515	94.73754	Ada	TIDAK OK	Lampirkan data dukung terinci sesuai dengan yang diminta pedoman
2.k1.4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelsyanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Perangkat Daerah&nbsp.yang telah memanfastkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama &nbsp.	Jumlah PD yang telah memanfasikan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama = 17. Jumlah PD = 15	113.3333	Ada	OK	
2.1.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan masyarukat dan desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeka Desa Membangun per tahun = 0. Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n) = 1	0	Ada	OK	
2.1.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun = 0. Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n) = 1	0	Ada	OK	
2.m.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluanga berencama	TFR (Angka Kelahiran Total)		2.01	Ada	TIDAK OK	Idealnya data dapat disajikan setiap tahunnya tanpa memmggu data dari BPS/BKKN karena data yang dibutuhkan harnya jumlah perempuan pada kelompok umur dan jumlah kelahirun dalam kelompok umur pada tahun 2024
2.m.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contruceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern = 83574. Jumlah Pasangan Usia Subur = 119134	70.15126	Ada	OK	
2.m.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkanan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (ummet need)	Jumleh PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani = 10444. Jumlah Pesangan Usia Subur = 119134	8.766599	Ada	TIDAK OK	Sesuaikan format data dukung dengan Pedoman
2.n.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten/kota		57	Ada	OK	
2.n.2	Urusan Pemerintehan Wejib Tidak Berkaitan Pelayunan Dasar	Perhubungan	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota		0.48	Ada	OK	
2.0.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo = 40. Jumlah PD = 40	100	Ada	OK	
2.0.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkuitan Pelayunan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi  	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi = 21. Jumlah Layanan Publik = 51	41.17647	Ada	OK	
2.0.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui	112.2159	Ada	OK	
	Dermudi Penyanan Dasar		kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota  	kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota = 695561. Jumlah penduduk = 619842				
2.p.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Palayunan Dasar	Koperasi, useha kecil dan menengah	kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota 	pemerintah daerah kabupaten/kota = 695561.	0	Tidak Ada		
2.p.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak	menengah	kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota   Meningkatnya Koperasi yangberkualitas	pemerintah daerah kabupaten/kota = 695561.  Jumlah penduduk = 619842  Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volumo usaha dan asset. Jumlah		Tidak Ada Tidak Ada		

2q	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkuitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	kabupaten/kota 	(Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota = -53634107485. Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota = 3243490280000	-1.653592	Ada	TIDAK OK	Sesuaikan dokumen pendukung penyebut dengan pedoman dan pastikan bahwa dokumen telah di stempel
	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	Tirgkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri &mbsp	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kab/kota = 37. Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota = 218767	0.016913	Ada	OK	
2.r.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarukatan  ,	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota = 404. jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota = 218767	0.184671	Ada	OK	
2.1.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan prestasi olahuga 		206	Ada	ок	
2.s.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidek Berkuitan Pelayanan Dasar	Stetistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencunaan pembangunan daerah &mbap &mbap	Iumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah = 40. jumlah PD = 40	100	Ada	OK	
2.8.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkuitan Pelayanan Dasar	Statistik	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daenah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah = 40. jumlah PD = 40	100	Āda	ОК	
2.t	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah  	Jumlah nilai per area keamanan informasi = 318. Jumlah area penilaian = 645	49.30233	Ada	ок	
2.u	Urusan Pemerintahan Wejib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Terlestanikannya Cagar Budaya Ambsp; &mbsp	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan = 14. Jumlah cagar budaya yang terdata = 14	100	Ada	ок	
2.v.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakuan	Nilai tingkat kegemarun memboca masyarakat		84.86	Ada	ок	
2.v.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		68.67	Ada	ок	
2.w.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayunan Dasar	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009) :		100	Ada	ОК	
2.w.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipen	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat		100	Ada	ОК	
	L	I.	L	1			1	

3.a	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (aumber data: one data KKP) 	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota = 16618.88. Turget Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan = 15551.1	106.8663	Ada	OK	
3.b.1	Urusan Pilihan	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan &r.bsp 	(Jumlah wisatawan tahun n - Jumlah wisatawan tahun n-1) = 882. Jumlah wisatawan tahun n-1 = 6572	13.42057	Ada	OK	
3.b.2	Urusan Pilihan	Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota 	(Aumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) = 121241. Jumlah wisatawan tahun n- 1 = 1018786	11.90054	Ada	OK	
3.b.3	Urusan Pilihan	Pariwisata	&ribsp Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual = 706590. Jumlah	55.29457	Ada	ok	
			 	kamar yang tersodia = 1277865				
3.b.4	Urusan Pilihan	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku &mbsp	Total Nilai kentribusi sektor pariwisata pada PDRB = 7084120000. Total PDRB Berlaku = 98414870000	7.198221	Ada	ок	
3.b.5	Urusan Pilihan	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Total realissi PAD dari sektor periwisata = 269829542438.92. Total realisasi PAD = 973187565368.21	27.72637	Ada	OK	
3.c.1	Urusan Pilihan	Pertanian	Produktivitas  pertanian per hektar per tahunProduktivitas  pertanian per tahun 	Armlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun = 7844.1. luas panen = 1719.4	456.2115	Ada	OK	
3.c.2	Urusen Pilihan	Pertanian	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persentase kasus zoonosis kab/ kota &mbsp	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t)  – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) zumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)	0	Tidak Ada		
3.d	Urusan Pilihan	Kehutanan			100	Ada	ОК	
3.e	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di keb/kota , ,  , ,	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin = 0. Jumlah perusahaan pemanfaatan pemas bumi = 1	0	Ada	ОК	
3.£1	Urusen Pilihan	Perdegangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin senuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)  Ambap,	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan = 73. Jumlah pelaku usaha di wilayah Kah/Kota = 73	100	Ada	OK	
3.£2	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase kinerja realisasi pupuk 	Realisasi = 695838. RDKK = 1131031	61.52245	Ada	OK	
3.£3	Urusen Pilihan	Perdagangan	Persentase alat Andash; alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku Anbap;	jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan = 6437, jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota = 10980	58.62477	Ada	ОК	
3.g.1	Urusan Pilitan	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota 	(Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n- Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1). Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1	0	Tidak Ada		

3.g.2	Urusan Pilihan	Perindustrian	Persentase peneapaian sasaran pembangunan	ı ı	ol	Ada	TIDAK OK	upload / lampirkan pada
3.82	Ottosai i alkai	- Cunded Mi	industri termesuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK			(Yuua	ID/III OK	bukti dukung dokumen kajian RPIK (2024) yaitu cover laporan awal, cover laporan atlara, cover laporan atlara, cover laporan atlara, cover buku potensi industri, cover album peta a3 RPIK kota samarinda dan cover raruperda RPIK kota samarinda
3.g.3	Urusan Pilihan	Perindustrian	Persentaso jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kocil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan. Jumlah izin yang dikeluarkan	0	Tidak Ada		
3.g.4	Urusan Pilihan	Perindustrian	Persentase juntlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan juntlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait  	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ~ 0. Jumlah izin yang dikeluarkan ~ 1	0	Ada	OK	
3.g.5	Urusen Pilihan	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupeten/kota , , , , , ,	Jumlah izin yang dipenteu dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 0. Jumlah izin yang dikeluarkun = 1	0	Ada	OK	
3.g.6	Urusen Pilihan	Perindustrian	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini 		50	Ada	OK	
3.h	Urusan Pilihan	Trensmigrasi	Tidak Ada Kewenangan Kabupaten/Kota		100	Ada	OK	
4.a.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan  	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan. Jumlah APBD	0	Tidak Ada		
4.a.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Rasio PAD  	Jumlah PAD = 973187565368.21. Jumlah Pendapatan pada APBD = 5177044600563.9	18.79813	Ada	OK	
4.a.3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) , 		3	Ada	OK	
4.a.4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 		3	Ada	OK	
4.a.5	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures )  	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures = 2602147689238.9. jumlah belanja APBD = 5477751130831.9	47.50394	Ada	ок	
4.a.6	Fungsi Pemunjang Urusan	Perencanaan dan Keuangan	Opini Laporan Keuangan		10	Ada	ОК	
4.b.1	Pemerintahan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama  	jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n. jumlah kontrak keseluruhan tahun n	o	Tidak Ada		
4.b.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukar dengan metode kompetirif &mbsp, &mbsp,	jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif. Jumlah seluruh pengadaan	0	Tidak Ada		
4.b.3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan Anbap; &nbap	Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan. total belanja operasi dan modal	0	Tidak Ada		
<u> </u>	I .	1	<u> </u>	<u> </u>	L	L	L	1

	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadsan	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksansan Pengadaan Berang/Jasa Pemerintah Duerah	Junlah Nilai PBJ yang Menggurakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mdro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Junlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1). Junlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1)	0	Tidak Ada		
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan		Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga keseluatan)&nbap,&nbap, &nbap, &nbap, &nbap,	Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas = 1888. Jumlah seluruh pegawai = 2851	66.22238	Ada	ОК	
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kepegawaian	Rasio pogawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Anbsp;Anbsp; Anbsp;	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) = 561. seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) = 2653	21.14587	Ada	TIDAK OK	Jumlah pris fungsional yang ada di data pemyebut dan pembilang harusnya jumlahnya sama (di pembilang total fungsional 561, di penyebut 458)
4.c.3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kepegawaian	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi = 95. seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) = 561	16.93405	Ada	ОК	
4.d.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Manajemen Keuangan	Budget execution: Devizsi realizasi belanja terhadap belanja total dalam APBD  	Realisasi Belanja = \$477751130831.9. Total Belanja APBD = \$797973000000	5.522997	Ada	OK	
4.d.2	Fungsi Peramjang Urusan Pemerintahan	Manajemen Keuangan	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggarun PAD dalam APBD  	Total PAD dalam realisasi = 973187565368.21. Total PAD dalam APBD = 771072268674	26.21224	Ada	OK	
4.d.3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Manajemen Keuangan	Manajemen Aset		4	Ada	OK	
4.d.4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Manajemen Keuangan	Cash Management: Rasio Anggarun Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelurunya &mbsp &mbsp	Nilai realisasi SiLPA = 285011129416.56. total belanja anggaran tahun sebelumnya = 3978553123000	7.163688	Ada	OK	
4.e.1	Fungai Penunjang Urusan Pemerintahan	Trunsparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units) &mbsp &mbsp	Realisasi Belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda = 7580157159. Anggaran belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda = 7713500000	98.27131	Ada	OK	
4.e.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Transparansi dan Partisipasi Publik	Akaes publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information) , ,  	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda = 8. total jumlah dokumen yang telah dirinci = 12	66.66667	Ada	ок	

No	Laporan Capaian Kinerja				Keselarasan dengan Perjanjian Kinerja		Keselarasan dengan RPJMD		an dengan (U	Kesimpulan
	Sasaran	Indikator	Target	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	74.95 angka	٧		٧			٧	Terdapat perbedaan satuar pada IKU
2	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Angka Harapan lama sekolah	15,51 angka	٧		٧			٧	Terdapat perbedaan satuar pada IKU
		Rata-rata lama sekolah	10,81 angka	٧		٧			٧	Terdapat perbedaan satuar pada IKU
3	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	52 Indeks	٧		٧			٧	-Satuan pada Capaian Kinerja 'Indeks' sedangkan pada IKU 'Poin'
4	Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	IPG	89,45 Indeks	٧		٧			٧	(2) Satuan pada Capaian Kinerja 'Indeks' sedangka pada IKU 'Poin'
5	Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal	Indeks Pembangunan Kebudayaan	55 Indeks	٧		٧			٧	Terdapat perbedaan satual pada IKU
8	Meningkatnya jumlah dan nilai investasi	Jumlah Nilai Investasi	Rp23.50T	٧			٧		٧	(1) Sasaran pada Capaian Kinerja 'Meningkatnya jumlah dan nilai investasi sedangkan pada RPJMD 'Meningkatnya nilai investasi' (2) Indikator pada Capaian Kinerja 'Jumlah Nilai Investasi' sedangkan pada RPJMD & IKU 'Nilai Investasi'
15	Meningkatkan eksebilitas inter dan antar wilayah kota	Persentase ketersediaan sarana prasarana sistem transportasi	73.29 Persentase	v		v			v	- Satuan pada Laporan Capaian Kinerja "Persentase" sedangkan Satuan pada IKU "Persen".
16	Meningkatkan kota yang nyaman dan berkualitas	Indeks kualitas lingkungan hidup		v		v			v	- Satuan pada Laporan Capaian Kinerja, PK "Indeks", sedangkan pada IKU tidak terdapat Satuan
		Persentase pemukiman yang tertata	21.75Persentase	v		v			v	- Satuan pada Laporan Capaian Kinerja, PK "Persentase", sedangkan satuan pada IKU "Persen"
17	Mengurangi resiko bencana dan perubahan Iklim	Persentase kawasan banjir yang tertangani	43.23Persentase	v		v			v	- Satuan pada Laporan Capaian Kinerja, PK "Persentase", sedangkan satuan pada IKU "persen"

<sup>\*</sup>Isi nomor sesuai nomor sasaran

KESIMPULAN:

1. Terdapat 11 (sebelas) Indikator Sasaran Strategis yang Sasaran/indikator sasaran/satuan indikator pada capaian kinerja yang belum selaras dengan Dokumen Perencanaan

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Catatan Hasil Reviu (CHR)
2	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Rata-rata lama sekolah	Angka	10,81	Target tahun 2024 lebih rendah dari capaian tahun 2023. Namur target tidak dapat diubah, menyesuaikan dengan target pada Pk
3	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	52	(2) Keabsahan bukti dukung Laporan Akhir IPP Kota Samarinda 2024 pada link drive <i>belum</i> terpenuhi (3) Capaian 2024 <i>berbeda-beda</i> nilainya antar bukti dukung: -63 dari IPP Kota Samarinda 2024 -66,04 dari Laporan Akhir IPP Kota Samarinda 2024 Hal. 88 & 89 -66,4 dari rekalkulasi Laporan Akhir IPP Kota Samarinda 2024 Hal. 88 & 89 yaitu (90+60+55+60+67)/7 = 66,4 (4) Target tahun 2024 52 lebih rendah dari capaian 2023 61,17 (5) Bukti dukung capaian 2022 belum tertera
4	Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	IPG	Indeks	89,45	(2) Keabsahan bukti dukung IPG Kota Samarinda pada link drive belum terpenuhi  (3) Capaian masih menggunakan angka tahun 2023  (4) Hal. 20 Persentase Capaian Kinerja Tahun 2024 perhitungannya belum sesuai (seharusnya 100,69%)  (5) Bukti dukung capaian tahun sebelumnya belum tertera
5	Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	55	Penjabaran capaian pada hal. 24 tidak sesuai dengan tabel pada hal. 23;
6	Meningkatnya pembangunan sektor tersier	Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB	Persentase	6,2	<ul> <li>(1) Keabsahan narasi analisis Capaian Indikator pada link drive belum terpenuhi</li> <li>(3) Capaian masih menggunakan angka TW 3 2024</li> <li>(5) Target tahun 2024 6,2 lebih rendah dari capaian 2023 8,43</li> <li>(8) Hal.30 pada baris target dan realisasi belum sinkron dengan target dan realisasi pada tabel capaian kinerja 2024 hal. 27</li> </ul>
7	Meningkatnya Kewirausahaan baru	Jumlah peningkatan kewirausahaan baru	Unit Usaha	2.000	(1) Keabsahan narasi analisis Capaian Indikator pada link drive belum terpenuhi  (2) Keabsahan bukti dukung pada drive belum terpenuhi
8	Meningkatnya jumlah dan nilai investasi	Jumlah nilai investasi	Rupiah	23,50 T	(1) Keabsahan narasi analisis Capaian Indikator pada link drive belum terpenuhi
13	Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Indeks SPBE	Indeks	2,7	Keabsahan bukti dukung pada link drive belum terpenuhi     Target tahun 2024 lebih rendah dari capaian tahun 2023     Hal. 66 Standar Nasional 2.79 belum memiliki bukti dukung     Belum ada dijelaskan analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja
14	Meningkatnya Birokrasi yang Akuntabel	Nilai AKIP	Nilai	63,44	3. Target tahun 2024 lebih rendah dari capaian tahun 2023

15	Meningkatkan aksesibilitas inter dan antas wilayah kota	Rasio aksesibilitas antar wilayah kota	Nilai	1.001	Target Th.2024 lebih rendah dari capaian tahun 2023;     Faktor Keberhasilan dalam pencapaian kinerja belum dijelaskan.
16	Meningkatkan kota yang nyaman dan berkualitas	Persentase tersedianya luasan RTH	Persentase	1,53	1. Keabsahan bukti dukung pada drive belum terpenuhi
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	59,28	Keabsahan bukti dukung belum terpenuhi hanya berupa draft
17	Meningkatnya kapasitas kota Tangguh	Indeks Resiko Bencana	Poin	85,05	Keabsahan bukti dukung pada drive belum terpenuhi     Belum mencantumkan Data dukung capaian nasional

#### KESIMPULAN:

- Terdapat 10 (Sepuluh) Indikator Sasaran Strategis yang dokumen pendukungnya belum andal;
   Terdapat 6 (enam) Indikator Sasaran Strategis yang penetapan target tahun 2024 lebih kecil dari capaian tahun 2023.